



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN
DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);

21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah, hasil evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 51

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 2-0-2021

RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun suatu rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Strategis dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang. Berdasarkan RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis maka disusunlah Rencana Kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dari satu sisi merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Perubahan Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah, dari sisi lain merupakan dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dimulai dari :

1. Persiapan penyusunan renja dimana persiapan penyusunan ini meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi renja, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi;
2. Penyusunan rancangan renja meliputi perumusan rancanagn renja dan penyajian rancangan renja;

3. Pelaksanaan forum OPD bertujuan untuk menyelaraskan program kegiatan, indikator kinerja dan anggaran yang berasal dari usulan-usulan melalui musrenbang;
4. Penetapan renja adalah pengesahkan renja oleh Kepala Daerah
Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah merupakan penjabaran dan saling berkaitan dari program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, RKPD Kabupaten dan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka menjadikan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah serta sebagai tindak lanjut dalam proses Rancangan APBD Kabupaten Pasuruan.

Tercapainya sasaran Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah beserta sasaran satuan kerja lain, secara sistematis diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga tercapainya sasaran Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 menggambarkan target indikator sasaran, program kegiatan, indikator kegiatan, satuan setiap indikator kegiatan dan target setiap indikator pada kegiatan yang satuannya telah ditetapkan dan akan dilaksanakan di Tahun 2022.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 memuat indikasi daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah adalah:

- 1.2.1 Landasan Idiil : Pancasila
- 1.2.2 Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- 1.2.3 Landasan Operasional :
 - 1.2.3.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 1.2.3.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 1.2.3.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 - 1.2.3.4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 1.2.3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 1.2.3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - 1.2.3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 1.2.3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - 1.2.3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 1.2.3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 1.2.3.11 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 - 1.2.3.12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
 - 1.2.3.13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.2.3.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.2.3.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.2.3.16 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.2.3.17 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan;

1.2.3.18 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Startegis Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2018 - 2023;

1.2.3.19 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah :

1.3.1 Renja disusun untuk menjamin komitmen terhadap kesepakatan Program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;

1.3.2 Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;

- 1.3.3 Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
 - 1.3.4 Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
 - 1.3.5 Membantu evaluasi kinerja dan penetapan target kinerja.
- 1.4 Sistematika Penulisan
- Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Tahun 2022, serta memuat landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah, uraian mengenai hubungan antara Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, dan penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BKPPD TAHUN LALU.

Bab ini terdiri dari 4 sub bagian yaitu:

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPPD Tahun lalu dan capaian Renstra Perubahan BKPPD;
Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra Perubahan BKPPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPPD;
Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Pelayanan BKPPD untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu.
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah;
Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKP
Melakukan tinjauan ulang (Review) terhadap rencana awal kegiatan - kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan serta mengkaitkan dengan segala isu-isu penting yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BKPPD

Bab ini terdiri dari 3 Sub bagian meliputi

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional ;

Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan umum dalam penyusunan Rencana Kerja BKPPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah;

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh BKPPD dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

3.3 Program dan Kegiatan;

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pihak tertentu dalam lingkungan BKPPD serta penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPPD

Bab ini berisikan rencana kerja tahunan, target kinerja dan perkiraan pagu indikatif anggaran.

BAB V. PENUTUP

Suatu aksi atau tindakan koreksi (*corrective action*) sebagai lanjutan langkah dalam mencapai perbaikan dan atau mengembalikan segala kegiatan pada tujuan yang seharusnya.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN
PELATIHAN DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan

Pagu awal belanja langsung Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan sebelum dirubah dalam DPA yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2020 Rp. 13.944.602.100,-. Pagu sebesar tersebut dilaksanakan untuk membiayai 2 biaya administrasi umum dan 4 program urusan wajib yang ada di Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan. Dalam pelaksanaannya total anggaran yang telah dialokasikan tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 6.878.393.902,-.

Dari pagu anggaran perubahan tahun 2020 Rp. 6.878.393.902,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 6.199.319.864,- sehingga persentase daya serap anggaran Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan sampai Desember 2020 sebesar 90,13%. Dari realisasi anggaran tersebut terdapat kegiatan yang realisasi dari penyerapan anggaran rendah yaitu kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan II, Pemberkasan Administrasi Kepegawaian dan Workshop Penyusunan Bezzeting masing-masing sebesar 54,32%, 53,67% dan 53,04% hal ini karena anggaran untuk Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan II dari 45 orang yang memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 36 orang, untuk Pemberkasan Administrasi Kepegawaian dan Workshop Penyusunan Bezzeting dianggarkan untuk perjalanan dinas pelaporan ditunda karena adanya wabah. Sedangkan program dan kegiatan sisanya berdasarkan realisasi telah memenuhi target hal ini karena semua program dan kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan didukung koordinasi serta evaluasi dengan instansi terkait atau mitra kerja sehingga hal-hal yang menjadi penghambat bisa diminimalisir. Implikasi dari realisasi tahun 2020 terhadap target capaian program adalah perlunya peningkatan dari kegiatan pendidikan pelatihan agar dapat mendongkrak target yang sudah ditetapkan. Dari hal tersebut

rencan tindak lanjutnya adalah melaksanakan program dan kegiatan prioritas agar fokus peningkatan capaian program dapat terwujud.

Berikut tabel 2.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah tahun berjalan Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2020										
40511	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian									
1101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%			
110102	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telepon, listrik dan air	13 rek/bln	12 rek/bln	12 rek/bln	12 rek/bln	100%			
110103	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan perkantoran yg baik	49 Jenis	49 Jenis	49 Jenis	49 Jenis	100%			
110107	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium PA, KPA, PPTK, Bendahara, Pemb Bendahara, Pengurus SPM, ferivikator, akutansi dan pengurus barang	20 org/bln	20 org/bln	20 org/bln	20 org/bln	100%			
110110	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	57 Jenis	57 Jenis	57 Jenis	57 Jenis	100%			
110111	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	509976 lbr	509976 lbr	509976 lbr	509976 lbr	100%			
110117	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%			
110118	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi	100 lap	100 lap	200 lap	170 lap	85%			
110119	Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya honor PTT dan Non PNS	27 org/bln	27 org/bln	26 org/bln	26 org/bln	100%			
1102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras kondisi baik	90%	90%	90%	85%	94%			
110210	Pengadaan Mebelair	Terpenuhinya mebelair kantor	1 pkt	1 pkt	2 pkt	2 pkt	100%			
110211	Pengadaan Peralatan Kantor	Terpenuhinya peralatan kantor	92 unit	90 unit	40 unit	40 unit	100%			
110222	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	2 pkt	2 pkt						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
110230	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	33 unit/kali	33 unit/kali	33 unit/kali	33 unit/kali	100%			
110230	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	47 unit/kali	47 unit/kali	23 unit/kali	23 unit/kali	100%			
1103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang telah dibina berkelakuan baik	69,00%	69,58%	70,00%	70,00%	100,00%			
		Persentase Pegawai Dengan SKP Berpredikat Sangat Baik	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	100%			
110305	Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Terpenuhinya pakaian terima tamu Kab	24 org	24 org						
110309	Pembangunan Aplikasi Absensi Pegawai Secara Online	Terpeliharanya server absensi online	1 pkt	1 pkt						
110309	Proses Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya proses penanganan kasus disiplin	25 SK	25 SK	25 SK	25 SK	100%			
110310	Koordinasi dan Fasilitasi LHKPN, Penghargaan Satya Lencana	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi LHKPN	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	100%			
110311	Sosialisasi Peraturan tentang Kepegawaian	Terlaksananya sosialisasi kepegawaian	150 org	150 org	120 org	120 org	100%			
110312	Koordinasi dan Fasilitasi Penilaian Kinerja	Terlaksananya koordinasi kinerja	180 org	180 org	180 org	180 org	100%			
1128	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase peserta diklat aparatur berpredikat sangat memuaskan	27%	27,56%	28%	27,58%	99%			
112801	Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis	Terlaksananya diklat	50 org	45 org	20 org	18 org	90%			
112807	Diklat Kepemimpinan Tk. II	Terlaksananya diklat PIM II	2 Orang	0 Orang						
112809	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Terlaksananya diklat PIM IV	40 Orang	40 Orang						
112810	Diklat Latihan Prajabatan	Terlaksananya diklat prajabatan	100 Orang	316 Orang	200 Orang	200 Orang	100%			
1129	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peserta diklat teknis fungsional yang sesuai dengan kompetensi	86%	86,84%	87%	86,85%	99,83%			
112948	Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya diklat teknis fungsional	80 Orang	80 Orang						
112950	Assesment/Uji kompetensi untuk pengisian dan pengangkatan jabatan	Terlaksananya assesment/uji kompetensi	21 org	21 org	21 org	21 org	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
112953	Diklat Bendahara	Terlaksananya diklat teknis fungsional			80 Orang	80 Orang	100%			
112954	Bimtek Peningkatan Kemampuan Aparatur Pengelola Kepegawaian	Terlaksananya bimtek peningkatan kompetensi ASN	75 Orang	75 Orang						
112955	Pemberian Bantuan ijin belajar, Tugas Belajar dan lkatan Dinas	Terlaksananya beasiswa untuk kualifikasi ijasah	154 org	154 org						
112951	Diklat Konvensi Hak Anak	Terlaksananya diklat teknis fungsional	80 Orang	80 Orang						
1130	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pegawai terakui Kualifikasi dalam Kepangkatan	65%	65,48%	66%	65,73%	99,59%			
113017	Seleksi dan Penetapan ASN dalam Pangkat dan Jabatan	Seleksi penetapan ASN dalam jabatan	500 Orang	450 Orang	450 Orang	400 Orang	89%			
113019	Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II	Terlaksananya ujian dinas tingkat I dan tingkat II	45 Orang	43 Orang	45 Orang	36 Orang	80,00%			
113026	Koordinasi dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat	Terpenuhinya usulan SK kepegangatan	8200 SK	8200 SK	6500 SK	6500 SK	100%			
113051	Fasilitasi/Koordinasi Profesi ASN	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi	10 kali	5 kali						
113054	Seleksi Pengisian dan Pengangkatan JPT	Terlaksananya seleksi JPT	1 kali	1 kali	2 kali	2 kali	100%			
1131	Program Pengelolaan Manajemen Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin	0	0	0	0	100%			
113101	Seleksi Penerimaan Pegawai ASN	Terlaksananya seleksi pegawai ASN	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%			
113102	Pemberian Penghargaan Bagi ASN yang Purna Tugas (Penyelesaian Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai)	Terlaksananya usulan pensiun	350 Org	350 Org	540 Org	540 Org	100%			
113103	Pemberkasan Administrasi Kepegawaian	Terdatanya berkas adminsitrase kepegawaian	12065 dok	11640 dok	111000 dok	111000 dok	100%			
113104	Workshop Penyusunan Bezzeting	Terlaksananya penyusunan bezzeting	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%			
113046	Pembangunan/Pengembangan Layanan Kepegawaian Berbasis IT	Terpeliharanya server data kepegawaian	1 sistem	1 sistem						
113049	Pembekalan ASN Menjelang Purna Tugas	Terlaksananya fasilitasi pembekalan purna tugas	80 Org	80 Org						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2021										
503	URUSAN PENUNJANG URUSAN									
50301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan kantor						90%	90%	100%
50301201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2 keg	2 keg	100%
5.03E+09	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan						2 dok	2 dok	100%
5.03E+09	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja						6 dok	6 dok	100%
50301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan Perangkat Daerah						3 keg	3 keg	100%
5.03E+09	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan untuk gaji dan tunjangan						12 bulan	12 bulan	100%
5.03E+09	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PTT dan THL						26 org	26 org	100%
5.03E+09	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium PA, KPA, PPTK, Bendahara, Pemb Bendahara, Pengurus SPM, verifikator, akutansi dan pengurus barang						20 org	20 org	100%
50301205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian						1 keg	1 keg	100%
5.03E+09	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan kepegawaian						1 kali	1 kali	100%
50301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah						4 keg	4 keg	100%
5.03E+09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK						57 Jenis	57 Jenis	100%
5.03E+09	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan						509976 lmbr	509976 lmbr	100%
5.03E+09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu						12 kali	12 kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5,03E+09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi						200 lap	200 lap	100%
50301207	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</i>	<i>Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah</i>						2 keg	2 keg	100%
5,03E+09	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair						2 unit	2 unit	100%
5,03E+09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan perkantoran						16 unit	16 unit	100%
50301208	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan jasa penunjang</i>						2 keg	2 keg	100%
5,03E+09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/telepon/internet						13 rek	13 rek	100%
5,03E+09	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor						49 unit	49 unit	100%
50301209	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah</i>						3 keg	3 keg	100%
5,03E+09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara						33 unit	33 unit	100%
5,03E+09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara						40 unit	40 unit	100%
5,03E+09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara						1 unit	1 unit	100%
50302	<i>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</i>	<i>Persentase pelayanan kepegawaian daerah</i>						90%	90%	100%
50302201	<i>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>	<i>Jumlah kegiatan pengadaan dan pemberhentian</i>						5 keg	5 keg	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03E+09	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah penyusun bezzetting						68 OPD	68 OPD	100%
5.03E+09	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah seleksi pegawai ASN						1 kali	1 kali	100%
5.03E+09	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen usulan pensiun						350 SK	350 SK	100%
5.03E+09	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah fasilitasi koordinasi ASN						4 kali	4 kali	100%
5.03E+09	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah berkas adminstrasi kepegawaian						11100 org	11100 org	100%
50302202	<i>Mutasi dan Promosi ASN</i>	<i>Jumlah kegiatan mutasi, pangkat dan promosi</i>						3 keg	3 keg	100%
5.03E+09	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah mutasi dan promosi jabatan						4 kali	4 kali	100%
5.03E+09	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah usulan SK kepangkatan						8500 SK	8500 SK	100%
5.03E+09	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pengembangan karier jabatan						4 kali	4 kali	100%
50302203	<i>Pengembangan Kompetensi ASN</i>	<i>Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi</i>						3 keg	3 keg	100%
5.03E+09	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah peserta bimtek peningkatan kompetensi ASN						80 org	80 org	100%
5.03E+09	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah peserta diklat						60 org	60 org	100%
5.03E+09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah peserta diklat						160 org	160 org	100%
50302204	<i>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	<i>Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja</i>						3 keg	3 keg	100%
5.03E+09	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah OPD koordinasi penilaian kinerja aparatur						68 OPD	68 OPD	100%
5.03E+09	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah laporan LHKPN dan penghargaan						3 lap	3 lap	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5,03E+09	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah dokumen proses kasus disiplin						25 SK	25 SK	100%
50402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase kompetensi SDM						44%	44%	100%
50402202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						2 keg	2 keg	100%
5,04E+09	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta uji kompetensi						40 org	40 org	100%
5,04E+09	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan PrajabatanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah diklat yang dilaksanakan						3 diklat	3 diklat	100%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2020.

Kenaikan ataupun penurunan indikator merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada tabel 2.2 yang akan disajikan terdapat satu indikator tujuan dan lima indikator sasaran. Pada indikator tujuan yaitu indeks profesionalitas aparatur sipil negara mengalami penurunan dan diproyeksikan serta diusahakan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan. Pada empat indikator sasaran yaitu persentase peningkatan kinerja ASN dalam penilaian SKP dan persentase ASN yang memiliki kualifikasi ijazah S1/S/S3 mengalami kenaikan sehingga diproyeksikan pada tahun berikutnya juga mengalami kenaikan sedangkan persentase pegawai yang lulus diklat dan persentase ASN yang lulus ujian tingkat I, II serta penyesuaian ijazah mengalami penurunan akibat wabah corona yang menyebabkan kegiatan tersebut mengalami pembatasan tetapi diharapkan proyeksi tahun depan mengalami kenaikan. Sedangkan satu indikator sasaran dari lima indikator sasaran tersebut adalah persentase pelanggaran disiplin mengalami penurunan dan diproyeksikan pada tahun berikutnya mengalami penurunan. Penurunan tersebut bukan berarti sesuatu hal yang dianggap tidak berhasil dalam melaksanakan pelayanan instansi, akan tetapi pada indikator ini adalah berlawanan atau berbeda dengan empat indikator yang lain dimana semakin turun merupakan sebuah keberhasilan instansi dalam melaksanakan tugasnya.

Keberhasilan ini merupakan upaya berupa pembinaan, pelayanan, penegakan, pendidikan dan pelatihan terhadap seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Berikut ditampilkan tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Tabel T.C-30
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<i>Tujuan :</i>											
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara			71%	72%	73%	74%	58,21%	72%	73%	74%	
	<i>Sasaran :</i>											
	Persentase pegawai yang lulus diklat			62%	63%	64%	65%	62%	63%	64%	65%	
	Persentase pelanggaran disiplin			0,18%	0,17%	0,16%	0,15%	0,18%	0,17%	0,16%	0,15%	
	Persentase peningkatan kinerja ASN dalam penilaian SKP			99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
	Nilai SAKIP OPD				BB	BB	BB		A	A	A	
	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi ijazah setara S1/S2/S3			65%	66%	67%	68%	65%	66%	67%	68%	
	Persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1,2,dan penyesuaian ijazah			73%	74%	75%	76%	73%	74%	75%	76%	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah.

Ada beberapa isu tuntutan masyarakat yang sedang dihadapi secara nasional berkaitan dengan Aparatur Negara diantaranya :

1. Rekrutmen Calon ASN dari Pelamar Umum untuk mengganti ASN yang memasuki BUP yang disiapkan penggantinya;
2. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural/fungsional karena pensiun untuk disiapkan penggantinya melalui promosi/pengangkatan dan pelantikan;
3. Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang disampaikan kepada seluruh aparatur/ASN untuk mengurangi pelanggaran disiplin sehingga dapat meningkatkan pelayanan;
4. Pengembangan data ASN melalui Sistem Kepegawaian (Simpeg);
5. Pengembangan sistem penilaian kinerja (Si-Kep);
6. Peningkatan kompetensi ASN melalui Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Workshop dan lain-lainnya baik dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau mandiri.

Sesuai Renstra dan RPJMD Kabupaten Pasuruan yang terkait dengan bidang aparatur pemerintah, isu strategis pokok / isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah adalah merupakan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya untuk dilaksanakan secara berkesinambungan. Prioritas utama tahapan pembangunan kedua pada penentuan isu-isu strategis antara lain meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu:

1. Masih kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara khususnya tenaga teknis,
2. Masih kurangnya pegawai yang dikirim mengikuti pendidikan, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis dan mengajukan ijin belajar untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi,

3. Tuntutan pengelolaan tata Pemerintahan yang baik dan pelayanan prima namun tidak diimbangi dengan pemberian Formasi untuk kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang pensiun di Daerah,
4. Belum optimalnya sarana pendukung untuk memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang memadai.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Minimnya anggaran pendidikan dan pelatihan;
2. Kurang memahaminya pegawai terhadap peraturan kepegawaian;
3. Berubah-ubahnya peraturan tentang kepegawaian;
4. Akibat adanya pandemi sehingga anggaran lebih banyak diutamakan dalam upaya pencegahan pandemi.

Dampak terhadap capaian visi, misi Kepala Daerah adalah dalam peningkatan sasaran kinerja RPJMD yang menjadi sasaran tujuan renstra yaitu Indeks Profesionalitas ASN perlu ekstra termasuk fokus dalam penganggaran pada peningkatan kompetensi ASN agar indeks kompetensi ASN bisa didongkar.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian dan pendidikan pelatihan aparatur antara lain :

Tantangan :

1. Minimnya anggaran diklat;
2. Berubah-ubahnya peraturan kepegawaian.

Peluang :

1. Adanya ASN yang mengikuti diklat/bimtek secara mandiri;
2. Upaya sosialisasi secara kontinyu.

Dari isu-isu strategis, rekomendasi, catatan-catatan penting maka dilanjutkan dengan penyusunan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta anggaran yang harus selaras dengan ranwal RKPD dan renstra.

2.4 Review terhadap Rencana awal RKPD

Dalam penyusunan renja perlu melakukan perbandingan ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang nantinya menjadi dasar dalam menyusun anggaran program dan kegiatan. Adapun tujuan dari membandingkan ranwal RKPD dengan analisis kebutuhan adalah RKPD merupakan dasar utama dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran dalam renja OPD selain itu juga bertujuan menyelaraskan dan

mensinkronisasikan program, kegiatan yang ada di RKPD dengan yang ada di renja OPD sehingga tujuan utama menjadi selaras dan mendukung pelaksanaan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan. Adapun hasil proses tersebut tidak ada perbedaan atau selaras antara ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Sehubungan dengan hal tersebut kami lampirkan tabel Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2021 pada Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan. Tabel 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2022.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : BKPPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Pas	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	90%	7.978.486.495	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Pas	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	90%	7.978.486.495	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Pas	<i>Jumlah kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			<i>- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Pas	<i>Jumlah kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pas	Jumlah dokumen perencanaan			<i>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Pas	Jumlah dokumen perencanaan		-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pas	Jumlah dokumen evaluasi kinerja			<i>- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Pas	Jumlah dokumen evaluasi kinerja		-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pas	Jumlah administrasi keuangan Perangkat Daerah	3 keg	6.812.151.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pas	Jumlah administrasi keuangan Perangkat Daerah	3 keg	6.812.151.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pas	Jumlah bulan untuk gaji dan tunjangan	12 bulan	6.170.056.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pas	Jumlah bulan untuk gaji dan tunjangan	12 bulan	6.170.056.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pas	Jumlah PTT dan THL	26 org	548.435.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pas	Jumlah PTT dan THL	26 org	548.435.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pas	Honorarium PA, KPA, PPTK, Bendahara, Pemb Bendahara, Pengurus SPM, verifikator, akutansi dan pengurus barang	20 org	93.660.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pas	Honorarium PA, KPA, PPTK, Bendahara, Pemb Bendahara, Pengurus SPM, verifikator, akutansi dan pengurus barang	20 org	93.660.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pas	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pas	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian		-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pas	Jumlah sosialisasi peraturan kepegawaian			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pas	Jumlah sosialisasi peraturan kepegawaian		-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pas	Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	4 keg	554.488.430	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pas	Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	4 keg	554.488.430	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pas	Jumlah jenis ATK	57 Jenis	179.981.120	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pas	Jumlah jenis ATK	57 Jenis	179.981.120	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pas	Jumlah barang cetak dan penggandaan	509976 lmr	189.130.810	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pas	Jumlah barang cetak dan penggandaan	509976 lmr	189.130.810	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pas	Jumlah kunjungan tamu	12 kali	5.287.800	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pas	Jumlah kunjungan tamu	12 kali	5.287.800	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pas	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	150 lap	180.088.700	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pas	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	150 lap	180.088.700	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pas	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah	1 keg	155.342.880	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pas	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah	1 keg	155.342.880	
	Pengadaan Mebel	Pas	Jumlah mebelair			Pengadaan Mebel	Pas	Jumlah mebelair		-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pas	Jumlah peralatan perkantoran	16 unit	155.342.880	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pas	Jumlah peralatan perkantoran	16 unit	155.342.880	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pas	Jumlah kegiatan jasa penunjang	2 keg	199.168.235	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pas	Jumlah kegiatan jasa penunjang	2 keg	199.168.235	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pas	Jumlah pembayaran listrik/air/telepon/inter net	13 rek	137.578.205	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pas	Jumlah pembayaran listrik/air/telepon/inter net	13 rek	137.578.205	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pas	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	49 unit	61.590.030	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pas	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	49 unit	61.590.030	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pas	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	2 keg	257.335.950	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pas	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	2 keg	257.335.950	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	33 unit	169.864.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	33 unit	169.864.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pas	Jumlah peralatan yang dipelihara	40 unit	87.471.450	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pas	Jumlah peralatan yang dipelihara	40 unit	87.471.450	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pas	Jumlah gedung yang dipelihara		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pas	Jumlah gedung yang dipelihara		-	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pas	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	90%	2.670.677.244	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pas	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	90%	2.670.677.244	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pas	Jumlah kegiatan pengadaan dan pemberhentian	5 keg	1.275.013.854	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pas	Jumlah kegiatan pengadaan dan pemberhentian	5 keg	1.275.013.854	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pas	Jumlah penyusun bezzetting	68 OPD	6.160.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pas	Jumlah penyusun bezzetting	68 OPD	6.160.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pas	Jumlah seleksi pegawai ASN	1 kali	1.179.357.074	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pas	Jumlah seleksi pegawai ASN	1 kali	1.179.357.074	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pas	Jumlah dokumen usulan pensiun	350 SK	58.496.780	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pas	Jumlah dokumen usulan pensiun	350 SK	58.496.780	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Pas	Jumlah fasilitasi koordinasi ASN	4 kali	6.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Pas	Jumlah fasilitasi koordinasi ASN	4 kali	6.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pas	Jumlah berkas adminstrasi kepegawaian	11100 dok	25.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pas	Jumlah berkas adminstrasi kepegawaian	11100 dok	25.000.000	
	Mutasi dan Promosi ASN	Pas	Jumlah kegiatan mutasi, pangkat dan promosi	3 keg	964.317.190	Mutasi dan Promosi ASN	Pas	Jumlah kegiatan mutasi, pangkat dan promosi	3 keg	964.317.190	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Pas	Jumlah mutasi dan promosi jabatan	4 kali	401.584.300	Pengelolaan Mutasi ASN	Pas	Jumlah mutasi dan promosi jabatan	4 kali	401.584.300	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pas	Jumlah usulan SK kepangkatan	8500 SK	172.432.990	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pas	Jumlah usulan SK kepangkatan	8500 SK	172.432.990	
	Pengelolaan Promosi ASN	Pas	Jumlah pengembangan karier jabatan	4 kali	390.299.900	Pengelolaan Promosi ASN	Pas	Jumlah pengembangan karier jabatan	4 kali	390.299.900	
	Pengembangan Kompetensi ASN	Pas	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi	2 keg	240.000.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Pas	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi	2 keg	240.000.000	
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pas	Jumlah peserta diklat	5 org	40.000.000	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pas	Jumlah peserta diklat	5 org	40.000.000	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Pas	Jumlah peserta diklat	40 org	200.000.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Pas	Jumlah peserta diklat	40 org	200.000.000	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pas	Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja	3 keg	191.346.200	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pas	Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja	3 keg	191.346.200	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pas	Jumlah OPD koordinasi penilaian kinerja aparatur	68 OPD	36.027.700	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pas	Jumlah OPD koordinasi penilaian kinerja aparatur	68 OPD	36.027.700	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pas	Jumlah laporan LHKPN dan penghargaan	3 lap	14.934.200	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pas	Jumlah laporan LHKPN dan penghargaan	3 lap	14.934.200	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pas	Jumlah dokumen proses kasus disiplin	25 SK	140.384.300	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pas	Jumlah dokumen proses kasus disiplin	25 SK	140.384.300	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pas	persentase pemenuhan standar kompetensi ASN	44%	650.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pas		44%	650.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pas	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2 keg	650.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pas	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2 keg	650.000.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pas	Jumlah peserta uji kompetensi	10 org	150.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pas	Jumlah peserta uji kompetensi	10 org	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan PrajabatanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Pas	Jumlah diklat yang dilaksanakan	1 diklat	500.000.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan PrajabatanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Pas	Jumlah diklat yang dilaksanakan	1 diklat	500.000.000	
JUMLAH TOTAL					11.299.163.739						11.299.163.739

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak adanya usulan program dan kegiatan pada musrenbang tahun 2022 dikarenakan secara tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah merupakan OPD pendukung dimana bidang utamanya kepegawaian dan pendidikan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara.

Usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang tahun 2022 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan pada Rencana Kerja Tahun 2022 dituangkan ke dalam lampiran tabel 2.5.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Pasuruan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Cat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN
PELATIHAN DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah mengacu dari arah kebijakan Pembangunan kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan terselenggaranya pemerintahan dan fungsi pelayanan publik yang prima secara professional serta berlandaskan iman dan taqwa hal ini diharapkan kegiatan berjalan searah dan tidak menyimpang dari kegiatan yang dilaksanakan.

Arah kebijakan nasional adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural sedangkan prioritas pembangunan nasional yaitu penguatan ketahanan ekonomi; pengembangan wilayah; peningkatan SDM; peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; penguatan infrastruktur; pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan stabilitas politik hukum dan transformasi pada publik.

Dengan melihat arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional serta kebijakan yang termuat pada renstra Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah maka diambil arah kebijakan tahun 2022.

Arah kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap peraturan di bidang kepegawaian melalui pendidikan dan pelatihan
2. Meningkatkan pola-pola pengembangan karier pegawai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui pendidikan kedinasan
3. Meningkatkan disiplin pegawai dengan pemberian reward dan punishment, melakukan monitoring dan evaluasi, melaksanakan pengawasan/kontrol dan melakukan pembinaan kepada pegawai
4. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat, dan akurat untuk meningkatkan kepuasan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mengoptimalkan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK).

Kebijakan tersebut sudah termuat pada Renstra dan Renja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah baik itu program dan penganggarannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah

Tujuan Renja BKPPD adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah sesuai dengan kewenangan dan fungsinya berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan memenuhi kebutuhan pegawai yang profesional, proporsional dan setara gender.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dan mengadopsi dari RPJMD Kabupaten Pasuruan dalam hal ini tujuan yang terkait dengan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta berdasarkan misi Bupati ke empat yaitu “Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”, maka ditetapkan tujuan Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu *“Terwujudnya Sumberdaya Aparatur yang Profesional”* dengan indikator tujuan yaitu :

“Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara”

Sasaran Renja BKPPD adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, terukur, dan dapat diaplikasikan secara nyata dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari program induk yakni Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah berkewajiban memberikan dukungan, motivasi yang kuat dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan fungsi/bidang kewenangannya. Berdasarkan makna tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan periode 2018 – 2023 menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Reformasi Birokrasi membawa berbagai dampak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi harapan masyarakat sekaligus menumbuhkan sikap kritis terhadap kinerja birokrasi, melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kompetensi ASN dan upaya lainnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas aparat birokrasi yang telah ada. Selain itu juga birokrasi tetap mengedepankan tatanan yang berspektif gender dalam arti tidak membeda-bedakan jenis kelamin aparat. Sehingga dengan demikian, birokrasi dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

Persentase Pegawai ASN yang Lulus Pendidikan dan Pelatihan

2. Meningkatnya Kinerja Aparatur Sipil Negara

Kinerja pegawai dijabarkan langsung dari misi organisasi. Penilaian kinerja dilakukan secara transparan dan obyektif. Penilaian kinerja menjadi bahan diagnosis dalam upaya peningkatan kinerja organisasi. Selanjutnya kinerja pegawai juga menjadi instrumen utama dalam pemberian *reward and punishment* termasuk untuk promosi dan rotasi pegawai. Dengan demikian, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah tersebut menunjang dan mendukung upaya pengembangan manajemen kepegawaian berbasis kinerja.

Dimana sasaran indikator dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara pada BKPPD Kabupaten Pasuruan adalah :

1. Persentase Pelanggaran Disiplin ASN;

2. Persentase peningkatan kinerja ASN dalam penilaian SKP;
 3. Nilai SAKIP OPD
3. Meningkatkan Kualifikasi ASN
- Perkembangan karier Aparatur Sipil Negara sangat menentukan kinerja pegawai ASN yang bersangkutan oleh karena itu diperlukan kondisi suasana kerja yang representatif baik itu di dalam penilaian yang objektif dan transparan dalam penentuan karier Aparatur Sipil Negara dan di dalam proses penataan Aparatur Sipil Negara baik itu di dalam proses mutasi maupun promosi sehingga Aparatur Sipil Negara yang ada terdorong untuk dapat berprestasi seoptimal mungkin untuk bisa meningkatkan kariernya.
- Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
1. Persentase ASN yang memiliki kualifikasi ijazah setara S1/S2/S3;
 2. Persentase ASN yang Lulus Ujian Tingkat 1,2,3 dan penyesuaian ijazah.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Rencana Kegiatan Tahun 2022

Program adalah bentuk instrumen yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah .

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik berupa personil (Sumberdaya Manusia) barang, modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tsb. Sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang dan jasa.

Program dan Kegiatan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan sesuai dengan Tupoksi OPDnya. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan adalah “Terwujudnya Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing” sedangkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan yang selaras dengan tugas fungsi Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah adalah misi ke 4 yaitu Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif,

bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis pada teknologi informasi.

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

1.1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.3. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

1.3.1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

1.4.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.3. Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

1.5.1. Pengadaan Mebel

1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.7. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

2.1. *Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*

2.1.1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

- 2.1.2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- 2.1.3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- 2.1.4. Evaluasi Pemberhentian ASN
- 2.1.5. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- 2.1.6. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 2.1.7. Pengelolaan Data Kepegawaian
- 2.2. *Mutasi dan Promosi ASN*
 - 2.2.1. Pengelolaan Mutasi ASN
 - 2.2.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - 2.2.3. Pengelolaan Promosi ASN
- 2.3. *Pengembangan Kompetensi ASN*
 - 2.3.1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - 2.3.2. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
 - 2.3.3. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - 2.3.4. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
 - 2.3.5. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
- 2.4. *Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*
 - 2.4.1. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2.4.2. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2.4.3. Pembinaan Disiplin ASN
 - 2.4.4. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - 2.4.5. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- 3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 - 3.1. *Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*
 - 3.1.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
 - 3.1.2. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan PrajabatanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : BKPPD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
503	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
50301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	Pas	90%		7.978.486.495	APBD		90%	10.903.705.740
					<i>Belanja operasi</i>	: 7.823.143.615				10.568.055.740
					<i>Belanja pegawai</i>	: 6.263.716.000				8.372.480.300
					<i>Belanja barang dan jasa</i>	: 1.559.427.615				2.195.575.440
					<i>Belanja modal</i>	: 155.342.880				335.650.000
50301201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pas			-	APBD		2 keg	21.382.600
					<i>Belanja operasi</i>	: -				21.382.600
					<i>Belanja pegawai</i>	: -				-
					<i>Belanja barang dan jasa</i>	: -				21.382.600
					<i>Belanja modal</i>	: -				-
5030120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Pas			-	APBD		2 dok	8.058.600
					<i>Belanja operasi</i>	: -				8.058.600
					<i>Belanja pegawai</i>	: -				-
					<i>Belanja barang dan jasa</i>	: -				8.058.600
					<i>Belanja modal</i>	: -				-
5030120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Pas			-	APBD		6 dok	13.324.000
					<i>Belanja operasi</i>	: -				13.324.000
					<i>Belanja pegawai</i>	: -				-
					<i>Belanja barang dan jasa</i>	: -				13.324.000
					<i>Belanja modal</i>	: -				-
50301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan Perangkat Daerah	Pas	3 keg		6.812.151.000	APBD		3 keg	9.005.922.725
					<i>Belanja operasi</i>	: 6.812.151.000				9.005.922.725
					<i>Belanja pegawai</i>	: 6.263.716.000				8.372.480.300
					<i>Belanja barang dan jasa</i>	: 548.435.000				633.442.425
					<i>Belanja modal</i>	: -				-
5030120201	Penyediaan Gaji dan	Jumlah bulan untuk gaji	Pas	12 bulan		6.170.056.000	APBD		12 bulan	8.274.137.300

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tunjangan ASN	dan tunjangan			<i>Belanja operasi</i> : 6.170.056.000 <i>Belanja pegawai</i> : 6.170.056.000 <i>Belanja barang dan jasa</i> : - <i>Belanja modal</i> : -				8.274.137.300 8.274.137.300 - -
5030120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PTT dan THL	Pas	26 org	548.435.000 <i>Belanja operasi</i> : 548.435.000 <i>Belanja pegawai</i> : - <i>Belanja barang dan jasa</i> : 548.435.000 <i>Belanja modal</i> : -	APBD		26 org	633.442.425 633.442.425 - 633.442.425 -
5030120203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium PA, KPA, PPTK, Bendahara, Pemb Bendahara, Pengurus SPM, verifikator, akuntansi dan pengurus barang	Pas	20 org	93.660.000 <i>Belanja operasi</i> : 93.660.000 <i>Belanja pegawai</i> : 93.660.000 <i>Belanja barang dan jasa</i> : - <i>Belanja modal</i> : -	APBD		20 org	98.343.000 98.343.000 98.343.000 - -
50301205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian	Pas		- <i>Belanja operasi</i> : - <i>Belanja pegawai</i> : - <i>Belanja barang dan jasa</i> : - <i>Belanja modal</i> : -	APBD		1 keg	14.197.680 14.197.680 - 14.197.680 -
5030120410	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan kepegawaian	Pas		- <i>Belanja operasi</i> : - <i>Belanja pegawai</i> : - <i>Belanja barang dan jasa</i> : - <i>Belanja modal</i> : -	APBD		1 kali	14.197.680 14.197.680 - 14.197.680 -
50301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	Pas	3 keg	554.488.430 <i>Belanja operasi</i> : 554.488.430 <i>Belanja pegawai</i> : - <i>Belanja barang dan jasa</i> : 554.488.430 <i>Belanja modal</i> : -	APBD		4 keg	746.951.835 746.951.835 - 746.951.835 -
5030120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK	Pas	57 Jenis	179.981.120 <i>Belanja operasi</i> : 179.981.120 <i>Belanja pegawai</i> : - <i>Belanja barang dan jasa</i> : 179.981.120 <i>Belanja modal</i> : -	APBD		57 Jenis	198.434.250 198.434.250 - 198.434.250 -
5030120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Pas	509976 lmbr	189.130.810 <i>Belanja operasi</i> : 189.130.810 <i>Belanja pegawai</i> : - <i>Belanja barang dan jasa</i> : 189.130.810	APBD		509976 lmbr	218.447.250 218.447.250 - 218.447.250

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					<i>Belanja modal</i> :	-			-
5030120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	Pas	12 kali		5.287.800	APBD	12 kali	5.829.810
					<i>Belanja operasi</i> :	5.287.800			5.829.810
					<i>Belanja pegawai</i> :	-			-
					<i>Belanja barang dan jasa</i> :	5.287.800			5.829.810
					<i>Belanja modal</i> :	-			-
5030120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	Pas	150 lap		180.088.700	APBD	300 lap	324.240.525
					<i>Belanja operasi</i> :	180.088.700			324.240.525
					<i>Belanja pegawai</i> :	-			-
					<i>Belanja barang dan jasa</i> :	180.088.700			324.240.525
					<i>Belanja modal</i> :	-			-
50301207	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah</i>	<i>Pas</i>	<i>1 keg</i>		<i>155.342.880</i>	APBD	<i>2 keg</i>	<i>335.650.000</i>
					<i>Belanja operasi</i> :	-			-
					<i>Belanja pegawai</i> :	-			-
					<i>Belanja barang dan jasa</i> :	-			-
					<i>Belanja modal</i> :	<i>155.342.880</i>			<i>335.650.000</i>
5030120705	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair	Pas			-	APBD	2 unit	29.700.000
					<i>Belanja operasi</i> :	-			-
					<i>Belanja pegawai</i> :	-			-
					<i>Belanja barang dan jasa</i> :	-			-
					<i>Belanja modal</i> :	-			29.700.000
5030120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan perkantoran	Pas	16 unit		155.342.880	APBD	26 unit	305.950.000
					<i>Belanja operasi</i> :	-			-
					<i>Belanja pegawai</i> :	-			-
					<i>Belanja barang dan jasa</i> :	-			-
					<i>Belanja modal</i> :	<i>155.342.880</i>			<i>305.950.000</i>
50301208	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan jasa penunjang</i>	<i>Pas</i>	<i>2 keg</i>		<i>199.168.235</i>	APBD	<i>2 keg</i>	<i>273.311.900</i>
					<i>Belanja operasi</i> :	<i>199.168.235</i>			<i>273.311.900</i>
					<i>Belanja pegawai</i> :	-			-
					<i>Belanja barang dan jasa</i> :	<i>199.168.235</i>			<i>273.311.900</i>
					<i>Belanja modal</i> :	-			-
5030120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/telepon/internet	Pas	13 rek		137.578.205	APBD	13 rek	174.036.500
					<i>Belanja operasi</i> :	137.578.205			174.036.500
					<i>Belanja pegawai</i> :	-			-
					<i>Belanja barang dan jasa</i> :	137.578.205			174.036.500
					<i>Belanja modal</i> :	-			-
5030120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Pas	49 unit		61.590.030	APBD	49 unit	99.275.400
					<i>Belanja operasi</i> :	61.590.030			99.275.400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
		penengkapan kantor			Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	61.590.030			99.275.400
					Belanja modal	:	-			-
50301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Pas	2 keg			257.335.950	APBD	3 keg	506.289.000
					Belanja operasi	:	257.335.950			506.289.000
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	257.335.950			506.289.000
					Belanja modal	:	-			-
5030120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Pas	33 unit			169.864.500	APBD	33 unit	205.112.250
					Belanja operasi	:	169.864.500			205.112.250
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	169.864.500			205.112.250
					Belanja modal	:	-			-
5030120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Pas	40 unit			87.471.450	APBD	40 unit	210.624.750
					Belanja operasi	:	87.471.450			210.624.750
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	87.471.450			210.624.750
					Belanja modal	:	-			-
5030120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Pas				-	APBD	1 unit	90.552.000
					Belanja operasi	:	-			90.552.000
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	-			90.552.000
					Belanja modal	:	-			-
50302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Pas	90%			2.670.677.244	APBD	90%	5.162.147.900
					Belanja operasi	:	2.670.677.244			5.162.147.900
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	2.670.677.244			5.162.147.900
					Belanja modal	:	-			-
50302201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan pengadaan dan pemberhentian	Pas	5 keg			1.275.013.854	APBD	7 keg	1.724.929.300
					Belanja operasi	:	1.275.013.854			1.724.929.300
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	1.275.013.854			1.724.929.300
					Belanja modal	:	-			-
5030220102	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah penyusun bezzctting	Pas	68 OPD			6.160.000	APBD	68 OPD	24.607.800
					Belanja operasi	:	6.160.000			24.607.800
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	6.160.000			24.607.800
					Belanja modal	:	-			-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	
5030220103	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah seleksi pegawai ASN	Pas	1 kali		1.179.357.074	APBD		1 kali	1.078.120.000	
					<i>Belanja operasi</i>	:				1.179.357.074	1.078.120.000
					<i>Belanja pegawai</i>	:				-	-
					<i>Belanja barang dan jasa</i>	:				1.179.357.074	1.078.120.000
					<i>Belanja modal</i>	:				-	-
5030220106	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen usulan pensiun	Pas	350 SK		58.496.780	APBD		350 SK	88.226.250	
					<i>Belanja operasi</i>	:				58.496.780	88.226.250
					<i>Belanja pegawai</i>	:				-	-
					<i>Belanja barang dan jasa</i>	:				58.496.780	88.226.250
					<i>Belanja modal</i>	:				-	-
5030220108	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah fasilitasi koordinasi ASN	Pas	4 kali		6.000.000	APBD		4 kali	90.893.250	
					<i>Belanja operasi</i>	:				6.000.000	90.893.250
					<i>Belanja pegawai</i>	:				-	-
					<i>Belanja barang dan jasa</i>	:				6.000.000	90.893.250
					<i>Belanja modal</i>	:				-	-
5030220111	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah berkas administrasi kepegawaian	Pas	11100 dok		25.000.000	APBD		11100 dok	80.157.000	
					<i>Belanja operasi</i>	:				25.000.000	80.157.000
					<i>Belanja pegawai</i>	:				-	-
					<i>Belanja barang dan jasa</i>	:				25.000.000	80.157.000
					<i>Belanja modal</i>	:				-	-
50302202	<i>Mutasi dan Promosi ASN</i>	<i>Jumlah kegiatan mutasi, pangkat dan promosi</i>	<i>Pas</i>	<i>3 keg</i>		964.317.190	APBD		<i>3 keg</i>	1.267.340.000	
					<i>Belanja operasi</i>	:				964.317.190	1.267.340.000
					<i>Belanja pegawai</i>	:				-	-
					<i>Belanja barang dan jasa</i>	:				964.317.190	1.267.340.000
					<i>Belanja modal</i>	:				-	-
5030220201	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah mutasi dan promosi jabatan	Pas	4 kali		401.584.300	APBD		4 kali	595.925.000	
					<i>Belanja operasi</i>	:				401.584.300	595.925.000
					<i>Belanja pegawai</i>	:				-	-
					<i>Belanja barang dan jasa</i>	:				401.584.300	595.925.000
					<i>Belanja modal</i>	:				-	-
5030220202	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah usulan SK kepangkatan	Pas	8500 SK		172.432.990	APBD		8500 SK	222.040.000	
					<i>Belanja operasi</i>	:				172.432.990	222.040.000
					<i>Belanja pegawai</i>	:				-	-
					<i>Belanja barang dan jasa</i>	:				172.432.990	222.040.000
					<i>Belanja modal</i>	:				-	-
5030220203	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pengembangan karier jabatan	Pas	4 kali		390.299.900	APBD		4 kali	449.375.000	
					<i>Belanja operasi</i>	:				390.299.900	449.375.000
					<i>Belanja pegawai</i>	:				-	-
					<i>Belanja barang dan jasa</i>	:				390.299.900	449.375.000
					<i>Belanja modal</i>	:				-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					Belanja modal	:	-		-	
50302203	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi	Pas	2 keg		:	240.000.000	APBD	5 keg	1.831.618.350
					Belanja operasi	:	240.000.000			1.831.618.350
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	240.000.000			1.831.618.350
					Belanja modal	:	-		-	
5030220303	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah peserta diklat	Pas	5 org		:	40.000.000	APBD	50 org	235.051.950
					Belanja operasi	:	40.000.000			235.051.950
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	40.000.000			235.051.950
					Belanja modal	:	-		-	
5030220309	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah peserta diklat	Pas	40 org		:	200.000.000	APBD	250 org	979.826.400
					Belanja operasi	:	200.000.000			979.826.400
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	200.000.000			979.826.400
					Belanja modal	:	-		-	
50302204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja	Pas	3 keg		:	191.346.200	APBD	5 keg	338.260.250
					Belanja operasi	:	191.346.200			338.260.250
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	191.346.200			338.260.250
					Belanja modal	:	-		-	
5030220402	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah OPD koordinasi penilaian kinerja aparatur	Pas	68 OPD		:	36.027.700	APBD	68 OPD	56.548.800
					Belanja operasi	:	36.027.700			56.548.800
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	36.027.700			56.548.800
					Belanja modal	:	-		-	
5030220404	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah laporan LHKPN dan penghargaan	Pas	3 lap		:	14.934.200	APBD	3 lap	22.170.750
					Belanja operasi	:	14.934.200			22.170.750
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	14.934.200			22.170.750
					Belanja modal	:	-		-	
5030220408	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah dokumen proses kasus disiplin	Pas	25 SK		:	140.384.300	APBD	25 SK	182.991.900
					Belanja operasi	:	140.384.300			182.991.900
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	140.384.300			182.991.900
					Belanja modal	:	-		-	
50402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	persentase pemenuhan standar kompetensi ASN	Pas	44%		:	650.000.000	APBD	45%	2.961.030.420
					Belanja operasi	:	650.000.000			2.961.030.420
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	650.000.000			2.961.030.420

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					<i>Belanja modal</i> :	-			-
50402202	<i>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	<i>Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	<i>Pas</i>	<i>2 keg</i>		650.000.000	APBD	<i>2 keg</i>	2.961.030.420
					<i>Belanja operasi</i> :	650.000.000			2.961.030.420
					<i>Belanja pegawai</i> :	-			-
					<i>Belanja barang dan jasa</i> :	650.000.000			2.961.030.420
					<i>Belanja modal</i> :	-		-	
5040220207	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta uji kompetensi	Pas	10 org		150.000.000	APBD	40 org	466.345.920
					<i>Belanja operasi</i> :	150.000.000			466.345.920
					<i>Belanja pegawai</i> :	-			-
					<i>Belanja barang dan jasa</i> :	150.000.000			466.345.920
					<i>Belanja modal</i> :	-		-	
5040220208	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan PrajabatanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah diklat yang dilaksanakan	Pas	1 diklat		500.000.000	APBD	3 diklat	2.494.684.500
					<i>Belanja operasi</i> :	500.000.000			2.494.684.500
					<i>Belanja pegawai</i> :	-			-
					<i>Belanja barang dan jasa</i> :	500.000.000			2.494.684.500
					<i>Belanja modal</i> :	-		-	
JUMLAH TOTAL						11.299.163.739			19.026.884.060
					<i>Belanja operasi</i> :	11.143.820.859			18.691.234.060
					<i>Belanja pegawai</i> :	6.263.716.000			8.372.480.300
					<i>Belanja barang dan jasa</i> :	4.880.104.859			10.318.753.760
					<i>Belanja modal</i> :	155.342.880			335.650.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPPD

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan menyusun Rencana Kerja tahun 2022 dan menguraikan dalam 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) yang keseluruhan penganggaran program dan kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (APBD) Kabupaten Pasuruan, Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah tahun 2022 dan perkiran maju tahun 2023 Kabupaten Pasuruan terlampir pada bagian lampiran Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Rancangan Awal RKPD				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Pas	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	90%	7.978.486.495
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Pas	<i>Jumlah kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pas	Jumlah dokumen perencanaan		-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pas	Jumlah dokumen evaluasi kinerja		-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pas	Jumlah administrasi keuangan Perangkat Daerah	3 keg	6.812.151.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pas	Jumlah bulan untuk gaji dan tunjangan	12 bulan	6.170.056.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pas	Jumlah PTT dan THL	26 org	548.435.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pas	Honorarium PA, KPA, PPTK, Bendahara, Pemb Bendahara, Pengurus SPM, verifikator, akutansi dan pengurus barang	20 org	93.660.000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pas	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pas	Jumlah sosialisasi peraturan kepegawaian		-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pas	Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	4 keg	554.488.430
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pas	Jumlah jenis ATK	57 Jenis	179.981.120
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pas	Jumlah barang cetak dan penggandaan	509976 lmr	189.130.810
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pas	Jumlah kunjungan tamu	12 kali	5.287.800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pas	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	150 lap	180.088.700
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pas	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah	1 keg	155.342.880
	Pengadaan Mebel	Pas	Jumlah mebelair		-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pas	Jumlah peralatan perkantoran	16 unit	155.342.880
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pas	Jumlah kegiatan jasa penunjang	2 keg	199.168.235
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pas	Jumlah pembayaran listrik/air/telepon/internet	13 rek	137.578.205
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pas	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	49 unit	61.590.030
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pas	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	2 keg	257.335.950
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	33 unit	169.864.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pas	Jumlah peralatan yang dipelihara	40 unit	87.471.450
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pas	Jumlah gedung yang dipelihara		-
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pas	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	90%	2.670.677.244
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pas	Jumlah kegiatan pengadaan dan pemberhentian	5 keg	1.275.013.854
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pas	Jumlah penyusun bezzetting	68 OPD	6.160.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pas	Jumlah seleksi pegawai ASN	1 kali	1.179.357.074

Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pas	Jumlah dokumen usulan pensiun	350 SK	58.496.780
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Pas	Jumlah fasilitasi koordinasi ASN	4 kali	6.000.000
Pengelolaan Data Kepegawaian	Pas	Jumlah berkas administrasi kepegawaian	11100 dok	25.000.000
Mutasi dan Promosi ASN	Pas	Jumlah kegiatan mutasi, pangkat dan promosi	3 keg	964.317.190
Pengelolaan Mutasi ASN	Pas	Jumlah mutasi dan promosi jabatan	4 kali	401.584.300
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pas	Jumlah usulan SK kepangkatan	8500 SK	172.432.990
Pengelolaan Promosi ASN	Pas	Jumlah pengembangan karier jabatan	4 kali	390.299.900
Pengembangan Kompetensi ASN	Pas	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi	2 keg	240.000.000
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pas	Jumlah peserta diklat	5 org	40.000.000
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Pas	Jumlah peserta diklat	40 org	200.000.000
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pas	Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja	3 keg	191.346.200
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pas	Jumlah OPD koordinasi penilaian kinerja aparatur	68 OPD	36.027.700
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pas	Jumlah laporan LHKPN dan penghargaan	3 lap	14.934.200
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pas	Jumlah dokumen proses kasus disiplin	25 SK	140.384.300
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pas	persentase pemenuhan standar kompetensi ASN	44%	650.000.000
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pas	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2 keg	650.000.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pas	Jumlah peserta uji kompetensi	10 org	150.000.000

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan PrajabatanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Pas	Jumlah diklat yang dilaksanakan	1 diklat	500.000.000
JUMLAH TOTAL				11.299.163.739

BAB V

PENUTUP

Berbagai potensi yang ada telah dan akan didayagunakan secara optimal baik anggaran, personel maupun sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugas-tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah dengan melaksanakan program/kegiatan di bidang kepegawaian dan kediklatan secara profesional dan proporsional.

Pada dasarnya rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2022 telah mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 yang berisi program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, target kinerja yang dicapai baik itu input, output, maupun outcome serta jadwal pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Rencana kerja tahun 2022 sebagai wujud dalam tindak lanjut pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang tertunda termasuk usulan-usulan program dan kegiatan yang sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah.

Saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan sehingga tahun kedepan akan dihasilkan Rencana Kerja secara lebih baik dan handal sebagai media untuk perencanaan jangka pendek yang berorientasi pada *Continuous Improvement (perbaikan berkelanjutan)*.

Akhirnya kami berharap Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M.IRSYAD YUSUF